

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
MALANG TAHUN 2021

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah rencana pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan, arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi: berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

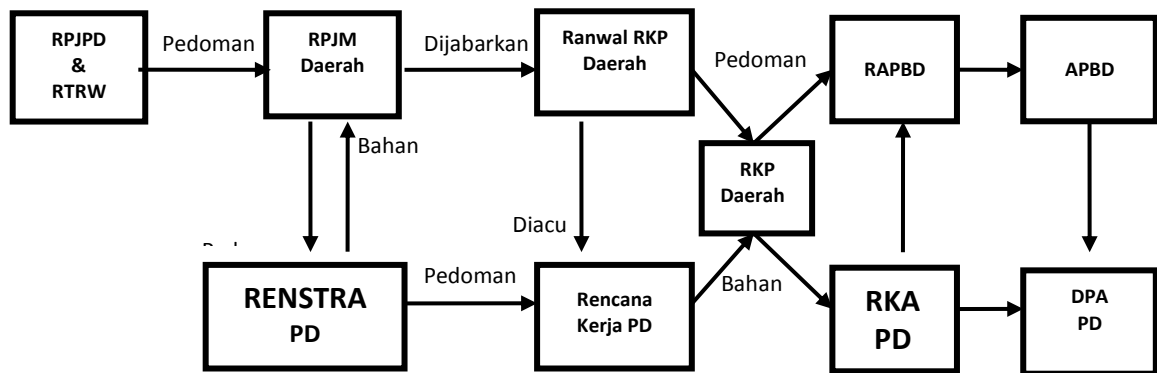
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 berpedoman Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021, hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun berjalan.

Proses penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diawali dengan penyusunan rancangan awal yang dilaksanakan pada akhir tahun 2019 sebagaimana Surat Bupati Malang Nomor 005/1032/35.07.032/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang rapat koordinasi persiapan penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah Kabupaten Malang tahun 2021 dan berpedoman Surat Edaran Bupati Malang nomor 050/741/35.07.202/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2021. Pendekatan perencanaan dilaksanakan melalui keterpaduan antara teknokratis, partisipatif, politis serta atas bawah maupun bawah atas. Pada proses penyusunan rancangan rencana kerja telah memadukan pendekatan perencanaan sebagaimana dimaksud dan mengacu surat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang nomor

005/2603/35.07.202/2020 tanggal 21 April 2020. Selanjutnya proses penyusunan rancangan akhir dilakukan seiring dengan adanya penyesuaian pagu anggaran rencana tahun 2021 serta arahan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi perihal penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2021. Penyusunan rancangan akhir didasarkan pada surat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 005/2603/35.07.202/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang rancangan akhir rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2021 dengan pagu anggaran mengacu pada surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/3634/35.07.202/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang penyesuaian pagu indikatif, target program/kegiatan dalam rangka finalisasi rencana kerja (renja) perangkat daerah tahun 2021.

Untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021, telah dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Malang : 188.45/138/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan

Pelaksanaan Perencanaan dan Penyelenggaraan yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan

Capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019, rata-rata capaian program rutin dan program pemberdayaan masyarakat dan desa mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sedangkan capaian kegiatan, ada beberapa kegiatan yang melebihi dari target yang ditetapkan.

Kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan adalah :

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, capaiannya kinerjanya 101,89%, dikarenakan pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu disesuaikan dengan jumlah pegawai.
- b. Pengembangan Usaha Sektor Informal capaian kinerjanya 283,33%, dikarenakan adanya tambahan desa yang diberikan sosialisasi Jalin Matra Provinsi Jawa Timur dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sejumlah 41 desa.
- c. Pengembangan Sumber Daya Desa capaian kinerjanya 229%, dikarenakan adanya tambahan desa yang diberikan Pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sejumlah 33 desa dan 1 (satu) desa Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra) | Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan) | |
|----------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2019 | Realisasi Renja PD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=(10/4) |
| 2.207.21.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00 | 100% | 100% | 100,00 |
| 2.207.21.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 2400 buah | 3651 buah | 2300 buah | 2300 buah | 100,00 | 6500 buah | 2300 buah | 95,83 |
| 2.207.21.01.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 363 ob | 363 ob | 366 ob | 366 ob | 100,00 | 363 ob | 366 ob | 100,83 |
| 2.207.21.01.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 12 ob | 0 ob | 12 ob | 12 ob | 100,00 | 12 ob | 12 ob | 100,00 |
| 2.207.21.01.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 10076 jenis | 3866 jenis | 1940 jenis | 1940 jenis | 100,00 | 1945 jenis | 5806 jenis | 57,62 |
| 2.207.21.01.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis) | 32720 jenis | 1525 jenis | 2415 jenis | 2415 jenis | 100,00 | 1535 jenis | 2415 jenis | 7,38 |
| 2.207.21.01.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 60 jenis | 45 jenis | 50 jenis | 50 jenis | 100,00 | 55 jenis | 50 jenis | 83,33 |
| 2.207.21.01.07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 1584 jenis | 1584 jenis | 1584 jenis | 1584 jenis | 100,00 | 4 jenis | 1584 jenis | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=(10/4) |
|----------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 2.207.21.01.08 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 13500 hok | 14940 hok | 13000 hok | 13000 hok | 100,00 | 11000 hok | 13000 hok | 96,30 |
| 2.207.21.01.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 165 hok | 423 hok | 155 hok | 146 hok | 94,19 | 460 hok | 146 hok | 88,48 |
| 2.207.21.01.10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 575 hok | 565 hok | 500 hok | 499 hok | 99,80 | 650 hok | 499 hok | 86,78 |
| 2.207.21.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00 | 100% | 100% | 100,00 |
| 2.207.21.02.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | 8 unit | 4 unit | 2 unit | 2 unit | 100,00 | 2 unit | 6 unit | 75,00 |
| 2.207.21.02.02 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | 18 jenis | 28 jenis | 17 jenis | 17 jenis | 100,00 | 20 jenis | 17 jenis | 94,44 |
| 2.207.21.02.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 19 unit | 16 unit | 17 unit | 17 unit | 100,00 | 18 unit | 17 unit | 89,47 |
| 2.207.21.02.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 30 jenis | 25 jenis | 12 jenis | 12 jenis | 100,00 | 30 jenis | 12 jenis | 40,00 |
| 2.207.21.02.05 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 4 jenis | 0 jenis | 1 jenis | 1 jenis | 100,00 | 1 jenis | 1 jenis | 25,00 |
| 2.207.21.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00 | 100% | 100% | 100,00 |
| 2.207.21.03.01 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 53 Stel | 108 Stel | 54 Stel | 54 Stel | 100,00 | 55 Stel | 54 Stel | 101,89 |
| 2.207.21.03.02 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel) | 209 stel | 0 stel | 54 stel | 54 stel | 100,00 | 55 stel | 54 stel | 25,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=(10/4) |
|----------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 2.207.21.04 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00 | 100% | 100% | 100,00 |
| 2.207.21.04.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | 25 orang | 35 orang | 25 orang | 25 orang | 100,00 | 30 orang | 25 orang | 100,00 |
| 2.207.21.05 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00 | 100% | 100% | 100,00 |
| 2.207.21.05.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 12 Buku | 12 Buku | 12 Buku | 12 Buku | 100,00 | 12 Buku | 12 Buku | 100,00 |
| 2.207.21.05.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 1 buku | 1 buku | 1 buku | 1 buku | 100,00 | 1 buku | 1 buku | 100,00 |
| 2.207.21.05.03 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 1 buku | 1 buku | 1 buku | 1 buku | 100,00 | 1 buku | 1 buku | 100,00 |
| 2.207.21.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00 | 83.33% | 100% | 100,00 |
| 2.207.21.06.01 | Pengembangan Lembaga Adat | Jumlah pembinaan lembaga adat desa | 15 Kec. | 33 Kec. | 4 Kec. | 4 Kec. | 100,00 | 10 Kec. | 4 Kec. | 26,67 |
| 2.207.21.06.02 | Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat | Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun. | 33 Kec. | 33 Kec. | 33 Kec. | 33 Kec. | 100,00 | 33 Kec. | 33 Kec. | 100,00 |
| 2.207.21.06.03 | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K | 130 desa | 52 desa | 26 desa | 26 desa | 100,00 | 26 desa | 78 desa | 60,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=(10/4) |
|----------------|---|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 2.207.21.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat | 100% | 54.67% | 100% | 100% | 100,00 | 76.00% | 100% | 100,00 |
| 2.207.21.07.01 | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah BUMDesa yang dibentuk. | 18 desa | 12 desa | 14 desa | 14 desa | 100,00 | 144 desa | 14 desa | 77,78 |
| 2.207.21.07.02 | Pengembangan Usaha Sektor Informal | Jumlah pelatihan usaha sektor informal | 18 desa | 6 desa | 45 desa | 45 desa | 100,00 | 4 desa | 51 desa | 283,33 |
| 2.207.21.07.03 | Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran | Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS | 33 Kec. | 36 Kec. | 20 Kec. | 20 Kec. | 100,00 | 33 Kec. | 20 Kec. | 60,61 |
| | | Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu | 16 desa | 0 desa | 0 desa | 0 desa | 0,00 | 0 desa | 0 desa | 0,00 |
| 2.207.21.08 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA | Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00 | 100% | 100% | 100,00 |
| 2.207.21.08.01 | Penataan Pemerintahan Desa | Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 100,00 | 378 Desa | 378 Desa | 100,00 |
| | | Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten | 20 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 100,00 | 4 Desa | 8 Desa | 40,00 |
| | | Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid | 390 Desa/Kel. | 390 Desa/Kel. | 390 Desa/Ke l. | 390 Desa/Kel. | 100,00 | 390 Desa/Ke l. | 390 Desa/Kel. | 100,00 |
| | | Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa. | 376 Desa | 100 Desa | 269 Desa | 269 Desa | 100,00 | - | 369 Desa | 98,14 |
| 2.207.21.08.02 | Penatausahaan Keuangan Desa | Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 100,00 | 378 Desa | 378 Desa | 100,00 |
| 2.207.21.08.03 | Penatausahaan Aset Desa | Jumlah aset desa yang didata | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 100,00 | 33 Kec | 378 Desa | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=(10/4) |
|----------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 2.207.21.09 | PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA | Persentase peningkatan pengembangan potensi desa. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00 | 100% | 100% | 100,00 |
| 2.207.21.09.01 | Pengembangan Kawasan Perdesaan | Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan | 8 desa | 16 desa | 14 desa | 14 desa | 100,00 | 12 desa | 14 desa | 175,00 |
| 2.207.21.09.02 | Pengembangan Sumber Daya Desa | Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa | 24 desa | 7 desa | 42 desa | 42 desa | 100,00 | 6 desa | 55 desa | 229,00 |
| | | Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang | 140 desa | 170 desa | 188 desa | 188 desa | 100,00 | 131 desa | 1888 desa | 134,00 |
| 2.207.21.09.03 | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional | 12 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 100,00 | 2 unit | 6 unit | 50,00 |
| | | Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG | 12 desa | 12 desa | 12 desa | 12 desa | 100,00 | 12 desa | 12 desa | 100,00 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need approach*), pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat (*bottom up approach*), pengorganisasian dan pelebagaan masyarakat (*community institutional approach*), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat (*prosperity approach*), pendekatan lintas sektoral dan program (*cross sectoral program approach*), pendayagunaan teknologi tepat guna (*appropriate technology approach*) serta pemberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan (*rural and urban community approach*).

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang saat ini masih relatif tinggi, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi cukup besar pula, kondisi ini diperberat dengan kondisi geografis kabupaten Malang mengharuskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapasitas kelembagaannya.

Dengan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana yang ada serta dukungan anggaran, maka dapat digambarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang

| No | Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput) | SPM/Standar Nasinonal | IKK | Target Renstra PD Tahun Ke - | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke - | | Proyeksi Tahun Ke - | | Catatan Analisis |
|----|--|-----------------------|-----|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Eselon II : Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju | | | 4 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 32 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 4 Desa | |
| 1 | Eselon III : Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Eselon IV : Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | | | 2300 buah | 2350 buah | 2400 buah | 2400 buah | 2300 buah | 2350 buah | 2400 buah | 2400 buah | |
| | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | | | 363 OB | 363 OB | 363 OB | 363 OB | 366 OB | 363 OB | 363 OB | 363 OB | |
| | Jumlah petugas kebersihan (OB) | | | 12 OB | 12 OB | 12 OB | 12 OB | 12 OB | 12 OB | 12 OB | 12 OB | |
| | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | | | 1,940 Jenis | 1,945 Jenis | 1950 jenis | 1950 jenis | 1,940 Jenis | 1,945 Jenis | 1950 jenis | 1950 jenis | |
| | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | | | 32,700 Jenis | 32,710 Jenis | 32.720 jenis | 32.720 jenis | 2.415 Jenis | 32,710 Jenis | 32.720 jenis | 32.720 jenis | |
| | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | | | 50 Jenis | 55 Jenis | 60 jenis | 60 jenis | 50 Jenis | 55 Jenis | 60 jenis | 60 jenis | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | | | 1,584 Jenis | 1,584 Jenis | 1,584 Jenis | 1,584 Jenis | 1,584 Jenis | 1,584 Jenis | 1,584 Jenis | 1,584 Jenis | |
| | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | | | 12,084 HOK | 12,090 HOK | 12,090 HOK | 12,090 HOK | 13,000 HOK | 12,090 HOK | 12,090 HOK | 12,090 HOK | |
| | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | | | 148 HOK | 150 HOK | 155 HOK | 160 HOK | 146 HOK | 150 HOK | 155 HOK | 160 HOK | |
| | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | | | 418 HOK | 425 HOK | 450 HOK | 475 HOK | 499 HOK | 425 HOK | 450 HOK | 475 HOK | |
| 2 | Eselon III : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Eselon IV : Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | | | 4 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 1 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 1 Unit | |
| | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | | | 10 Jenis | 16 Jenis | 17 Jenis | 18 Jenis | 17 Jenis | 16 Jenis | 17 Jenis | 18 Jenis | |
| | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | | | 17 Unit | 17 Unit | 18 Unit | 19 Unit | 17 Unit | 17 Unit | 18 Unit | 19 Unit | |
| | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | | | 28 Jenis | 30 Jenis | 30 Jenis | 30 Jenis | 12 Jenis | 30 Jenis | 30 Jenis | 30 Jenis | |
| | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | |
| 3 | Eselon III : Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Eselon IV : Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel) | | | 108 Stel | 53 Stel | 53 Stel | 53 Stel | 54 Stel | 53 Stel | 53 Stel | 53 Stel | |
| | Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel) | | | 108 Stel | 53 Stel | 53 Stel | 53 Stel | 54 Stel | 53 Stel | 53 Stel | 53 Stel | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|---|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----|
| 4 | Eselon III : Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Eselon IV : Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | | | 25 orang | 25 orang | 25 orang | 25 orang | 25 orang | 25 orang | 25 orang | 25 orang | |
| 5 | Eselon III : Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Eselon IV : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | | | 12 Buku | 12 Buku | 12 Buku | 12 Buku | 12 Buku | 12 Buku | 12 Buku | 12 Buku | |
| | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | | | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | |
| | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | | | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | |
| 6 | Eselon III : Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati. | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Eselon IV : Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa. | | | 307 Desa | - | 12 Desa | - | 269 Desa | - | 12 desa | - | |
| | Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa | | | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | |
| | Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan desa | | | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------|--|---|---|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----|
| | Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid | | | 390 Ds/Kel. | 390 Ds/Kel. | 390 Ds/Kel. | 390 Ds/Kel. | 390 Ds/Kel. | 390 Ds/Kel. | 390 Ds/Kel. | 390 Ds/Kel. | |
| | Jumlah desa berprestasi tingkat Kabupaten | | | 3 Desa | 3 Desa | 3 Desa | 3 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 4 Desa | |
| | Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa | | | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | |
| | Jumlah aset desa yang didata | | | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | |
| 7 | Eselon III : Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa | | | 66,67 % | 83,33 % | 100% | 100% | 66,67 % | 83,33 % | 100 % | 100% | |
| | Eselon IV : Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K | | | 26 Desa | 26 Desa | 26 Desa | 26 Desa | 26 Desa | 26 Desa | 26 Desa | 26 Desa | |
| | Jumlah pembinaan lembaga adat desa | | | 4 Kec. | 10 Kec. | 15 Kec | 15 Kec. | 4 Kec. | 10 Kec. | 15 Kec | 15 Kec. | |
| | Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat. | | | 33 Kec. | 33 Kec. | 33 Kec. | 33 Kec. | 33 Kec. | 33 Kec. | 33 Kec. | 33 Kec. | |
| 8 | Eselon III : Persentase peningkatan pengembangan potensi desa | | | 62.79% | 81.4% | 100% | 100% | 62.79% | 81.4% | 100% | 100% | |
| | Eselon IV : Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan | | | 16 Desa | 8 Desa | 8Desa | 8 Desa | 14 Desa | 8 Desa | 8 Desa | 8 Desa | |
| | Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa | | | 5 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 42 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 4 Desa | |
| | Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang | | | 115 desa | 127 desa | 140 desa | 140 desa | 188 desa | 190 desa | 190 desa | 190 desa | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------|---|---|---|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|--|
| | Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional | | | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | - | - | 2 Unit | 2 Unit | |
| | Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG | | | 12 unit | 12 unit | 12 unit | 12 unit | 12 unit | 12 unit | 12 unit | 12 unit | |
| 10 | Eselon III : Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. | | | 54,67% | 76% | 100% | 100% | 54,67% | 76% | 100% | 100% | |
| | Eselon IV : Jumlah BUMDesa yang dibentuk. | | | 14 Desa | 16 Desa | 18 Desa | 18 Desa | 14 Desa | 16 Desa | 18 Desa | 18 Desa | |
| | Jumlah pelatihan usaha sektor informal | | | 4 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 45 Desa | 4 Desa | 4 Desa | 4 Desa | Realisasi Tahun 2019 sejumlah 45 desa, terdiri dari 41 Desa Jalin Matra dari Prov. Jatim dan 4 desa pelatihan usaha sektor informal. |
| | Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat | | | 33 Kec | 33 Kec | 33 Kec | 33 Kec | 20 Kec | 33 Kec | 33 Kec | 33 Kec | |
| | Jumlah Pelatihan Usaha Pokja Posyandu | | | 16 Desa | 16 Desa | 16 Desa | 16 Desa | - | 16 Desa | 16 Desa | 16 Desa | |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1 Peluang

- Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Malang dalam pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Regulasi tentang Pemberdayaan Masyarakat baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun Daerah;
- Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah;
- Dukungan dari Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.3.2 Tantangan

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- Masih tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin;
- Luas wilayah dan kondisi geografis.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah telah disusun pada akhir tahun sebelum awal tahun kegiatan berjalan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan situasi dan kondisi, maka Rancangan Kerja Pemerintah Daerah tersebut perlu mendapatkan review. Adapun review terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Malang

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|---|----------------|-------------------------|--|--------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif Rp. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | 1.468.782.000,00 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | 1.468.782.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DPMD | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 2400 buah | 13.891.000,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DPMD | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 2400 buah | 13.891.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | DPMD | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 363 ob | 607.916.000,00 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | DPMD | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 363 ob | 607.916.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | DPMD | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 12 ob | 25.004.000,00 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | DPMD | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 12 ob | 25.004.000,00 | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | DPMD | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 1950 jenis | 69.457.000,00 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | DPMD | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 1950 jenis | 69.457.000,00 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | DPMD | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 32720 jenis | 23.323.000,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | DPMD | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 32720 jenis | 23.323.000,00 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DPMD | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 60 jenis | 2.940.000,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DPMD | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 60 jenis | 2.940.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|------|--|-------------|-----------------------|--|------|--|-------------|-----------------------|----|
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | DPMD | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 1584 jenis | 6.251.000,00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | DPMD | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 1584 jenis | 6.251.000,00 | |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | DPMD | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 13500 hok | 210.000.000,00 | Penyediaan Makanan dan Minuman | DPMD | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 13500 hok | 210.000.000,00 | |
| | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | DPMD | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 165 hok | 270.000.000,00 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | DPMD | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 165 hok | 270.000.000,00 | |
| | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | DPMD | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 575 hok | 240.000.000,00 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | DPMD | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 575 hok | 240.000.000,00 | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 198.893.000,00 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 168.893.000,00 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | DPMD | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | 1 unit | 28.000.000,00 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | DPMD | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | 1 unit | 28.000.000,00 | |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | DPMD | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | 10 jenis | 71.650.000,00 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | DPMD | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | 10 jenis | 41.650.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|-------------|----------------------|---|------|---|-------------|----------------------|----|
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | DPMD | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 19 unit | 49.175.000,00 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | DPMD | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 19 unit | 49.175.000,00 | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | DPMD | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 30 jenis | 22.068.000,00 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | DPMD | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 30 jenis | 22.068.000,00 | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | DPMD | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 1 jenis | 28.000.000,00 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | DPMD | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 1 jenis | 28.000.000,00 | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100% | 58.355.000,00 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100% | 58.355.000,00 | |
| | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | DPMD | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 53 Stel | 30.000.000,00 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | DPMD | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 53 Stel | 30.000.000,00 | |
| | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | DPMD | Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel) | 53 stel | 28.355.000,00 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | DPMD | Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel) | 53 stel | 28.355.000,00 | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | 100% | 2.894.000,00 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | 100% | 2.894.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|-------------|-----------------------|---|------|---|-------------|-----------------------|----|
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal | DPMD | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | 25 orang | 2.894.000,00 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | DPMD | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | 25 orang | 2.894.000,00 | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100% | 125.573.000,00 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100% | 125.573.000,00 | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DPMD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 12 Buku | 112.000.000,00 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DPMD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 12 Buku | 112.000.000,00 | |
| | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | DPMD | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 1 buku | 5.191.000,00 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | DPMD | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 1 buku | 5.191.000,00 | |
| | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | DPMD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 1 buku | 8.382.000,00 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | DPMD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 1 buku | 8.382.000,00 | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. | | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | 100% | 615.000.000,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. | | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | 100% | 685.000.000,00 | |
| | Pengembangan Lembaga Adat | DPMD | Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa | 10 Kec. | 200.000.000,00 | Pengembangan Lembaga Adat | DPMD | Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa | 10 Kec. | 150.000.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|------|---|-------------|-----------------------|--|------|---|-------------|-----------------------|----|
| | Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat | DPMD | Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun. | 33 Kec. | 225.000.000,00 | Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat | DPMD | Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun. | 33 Kec. | 225.000.000,00 | |
| | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | DPMD | Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K | 26 desa | 190.000.000,00 | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | DPMD | Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K | 26 desa | 160.000.000,00 | |
| | | | | | | | | Jumlah Pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten | 35 Kali | 50.000.000,00 | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT | | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat | 100% | 555.406.000,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT | | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat | 100% | 525.406.000,00 | |
| | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | DPMD | Jumlah BUMDesa yang dibentuk. | 18 desa | 231.525.000,00 | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | DPMD | Jumlah BUMDesa yang dibentuk. | 18 desa | 271.525.000,00 | |
| | Pengembangan Usaha Sektor Informal | DPMD | Jumlah pelatihan usaha sektor informal | 4 desa | 140.000.000,00 | Pengembangan Usaha Sektor Informal | DPMD | Jumlah pelatihan usaha sektor informal | 4 desa | 110.000.000,00 | |
| | Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran | DPMD | Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS | 20 Kec. | 126.000.000,00 | Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran | DPMD | Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS | 20 Kec. | 96.000.000,00 | |
| | | DPMD | Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu | 10 desa | 57.881.000,00 | | DPMD | Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu | 10 desa | 47.881.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|--|----------------------|-----------------------|---|------|--|----------------------|-----------------------|----|
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA | | Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati. | 100% | 930.396.000,00 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA | | Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati. | 100% | 920.396.000,00 | |
| | Penataan Pemerintahan Desa | DPMD | Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa | 378 Desa | 231.530.000,00 | Penataan Pemerintahan Desa | DPMD | Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa | 378 Desa | 251.530.000,00 | |
| | | DPMD | Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten | 3 Desa | 180.000.000,00 | | DPMD | Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten | 3 Desa | 160.000.000,00 | |
| | | DPMD | Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid | 390 Desa/Ke 1. | 88.000.000,00 | | DPMD | Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid | 390 Desa/ Kel. | 88.000.000,00 | |
| | | DPMD | Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa. | 12 Desa | 51.866.000,00 | | DPMD | Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa. | 12 Desa | 41.866.000,00 | |
| | Penatausahaan Keuangan Desa | DPMD | Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa | 378 Desa | 285.000.000,00 | Penatausahaan Keuangan Desa | DPMD | Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa | 378 Desa | 285.000.000,00 | |
| | Penatausahaan Aset Desa | DPMD | Jumlah aset desa yang didata | 378 Kec | 94.000.000,00 | Penatausahaan Aset Desa | DPMD | Jumlah aset desa yang didata | 378 Kec | 94.000.000,00 | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA | | Persentase peningkatan pengembangan potensi desa. | 100% | 685.000.000,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA | | Persentase peningkatan pengembangan potensi desa. | 100% | 635.000.000,00 | |
| | Pengembangan Kawasan Perdesaan | DPMD | Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan | 8 desa | 184.000.000,00 | Pengembangan Kawasan Perdesaan | DPMD | Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan | 8 desa | 164.000.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|--|----------|-------------------------|---|------|--|----------|-------------------------|----|
| | Pengembangan Sumber Daya Desa | DPMD | Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa | 4 desa | 172.000.000,00 | Pengembangan Sumber Daya Desa | DPMD | Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa | 4 desa | 157.000.000,00 | |
| | | DPMD | Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang. | 140 desa | 95.000.000,00 | | DPMD | Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang. | 140 desa | 100.000.000,00 | |
| | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | DPMD | Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional | 1 unit | 114.000.000,00 | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | DPMD | Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional | 1 unit | 94.000.000,00 | |
| | | | Jumah Desa pemanfaat/penerima bantuan peralatan TTG | 12 desa | 120.000.000,00 | | | Jumah Desa pemanfaat/penerima bantuan peralatan TTG | 12 desa | 120.000.000,00 | |
| | JUMLAH | | | | 4.640.299.000,00 | | | | | 4.490.939.000,00 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat merupakan usulan pembangunan dari Desa/Kelurahan dibidang pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari alokasi yang disediakan APBD tiap-tiap desa sebesar 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah).

Usulan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat oleh masing-masing desa/kelurahan yang diakomodir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah usulan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Usulan program kegiatan dari Desa/Kelurahan telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan akan menjadi program dan kegiatan dinas.

Daftar usulan program dan kegiatan pembangunan dari Desa/Kelurahan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 80 (Delapan puluh) usulan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.925.224.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tercantum pada aplikasi e-Musrenbang Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021

| No | Program/Kegiatan | | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|-----|--|---|--------------------------------------|---|------------------|---------|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Simojayan Kec. Ampelgading | Pelatihan Bumdes Simojayan 1 kali Pelatihan | 25 Orang | |
| 2 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading | Pelatihan Manajemen Kepengurusan Bumdes | 2 Kali | |
| 3 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Wonorejo Kec. Bantur | Pendampingan Bumdes (Memahami, Memulai, Menentukan Jenis Usaha Dan Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa). | 1 Paket | |
| 4 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang | Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Menghadapi Era Digital | 78 Orang | |
| 5 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Pringu Kecamatan Bululawang | Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Bumdes | 20 Org X 2 Kl | |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Amadanom Kec. Dampit | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 17 Orang | |
| 7 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Bumirejo Kec. Dampit | Pelatihan Lembaga (Bpd dan Lpmd) | 2 Paket | |

| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|---|---------------------------------|---|------------|-----|
| 8 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Kelurahan Dampit Kec. Dampit | Pembinaan Rt Rw (Pelatihan). | 50 Orang | |
| 9 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Pojok Kec. Dampit | Pelatihan Manajemen Bumdes " Tirta Abadi" | 20 Orang | |
| 10 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Srimulyo Kec. Dampit | Pembinaan Bumdesa | 1 Paket | |
| 11 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Usaha Sektor Informal | Desa Gadingkulon Kec. Dau | Pelatihan Menjahit dan Bordir (Meningkatkan Keterampilan dan Daya Saing). | 100 Orang | - |
| 12 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Selorejo Kec. Dau | Pelatihan Penataan Administrasi Bagi Kader PKK Desa Selorejo | 30 Orang | . |
| 13 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Tegalweru Kec. Dau | Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Desa. | 2 Kelompok | . |
| 14 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo | Pelatihan Pemberdayaan Psm,lpm d & Kpmd | 1 klpk | |
| 15 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo | Pelatihan Rt /rw B Dan Lpmd (Yang Akuntabel Dalam Melayani Masyarakat) | 114 Org | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|---|------------------------------------|--|----------|
| 16 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Purworejo Kec. Donomulyo | Pelatihan Administrasi Perkantoran (Terlatihnya Perangkat Desa Dalam Menyusun Surat Menyurat dan Kearsipan). | 12 Orang |
| 17 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Purworejo Kec. Donomulyo | Pelatihan Pembinaan (Terlatihnya Anggota BPD dan LPMD Desa) | 20 orang |
| 18 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Tlogosari Kec. Donomulyo | Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 12orang |
| 19 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Gajahrejo | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 14 Orang |
| 20 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Gajahrejo Kec. Gedangan | Penguatan Kelembagaan PKK Desa | 60 Orang |
| 21 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Balai Desa Girimulyo Kec. Gedangan | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. | 2 Kali |
| 22 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Balai Desa Girimulyo Kec. Gedangan | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bumdesa | 2 Kali |
| 23 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Segaran Kec. Gedangan | Peningkatan Kapasitas Kinerja Perangkat Desa, BPD dan Rt/Rw. | 75 Orang |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| 24 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Sidodadi Kec. Gedangan | Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa | 3 Hari X 12 Orang |
| 25 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Tumpakrejo Kec. Gedangan | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 12 Orang |
| 26 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Tumpakrejo Kec. Gedangan | Peningkatan Kapasitas Perangkat BPD. | 7 Orang |
| 27 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Kantor Desa Sukorejo Kec. Gondanglegi | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan Desa | 50 orang |
| 28 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Balai Desa Jabung Kec. Jabung | Pelatihan Pengembangan Sdm Pengurus Bumdes dan Pelaku Home Industri | 45 Orang |
| 29 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Kantor Desa Ngadirejo Kec. Jabung | Pelatihan Pengelolaan Bumdes (Mengembangkan Kapasitas Pengelola Bumdes) | 20 Orang |
| 30 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Sidorejo Kec. Jabung | Pelatihan Dan Peningkatan Bumdes | 20 orang |
| 31 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Arjowilangun Kec. Kalipare | Peningkatan SDM Perangkat Desa Dalam Pelayanan kepada Masyarakat | 1 Paket |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|---|---------------------------------|--|-----------|
| 32 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Arjowilangun Kec. Kalipare | Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPMD | 22 Orang |
| 33 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Putukrejo Kec. Kalipare | Pelatihan Bumdes dan Kopwan | 30 orang |
| 34 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Tumpakrejo Kec. Kalipare | Pelatihan dan Penyuluhan (Pelatihan dan Peningkatan Kelembagaan Bumdes) | 1 Paket |
| 35 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Girimoyo Kec. Karangploso | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sdm LKD | 100 Orang |
| 36 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Pait Kec. Kasembon | Peningkatan Kelembagaan Bumdes | 20 orang |
| 37 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Sukosari Kec. Kasembon | Pendampingan Bumdes Untuk Pemetaan Potensi Desa | 1 Desa |
| 38 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Sengguruh Kec. Kepanjen | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa (Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Pemerintah Desa) | 15 Orang |
| 39 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Sukoraharjo Kec. Kepanjen | Pembinaan Kelembagaan (Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Handal). | 210 Orang |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 40 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Talangagung Kec. Kepanjen | Pelatihan Speaking dan Personality (Meningkatkan Kualitas Sdm Kader PKK). | 42 Orang |
| 41 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Kesamben Kec. Ngajum | Bimtek Pengembangan Sdm Perangkat Desa | 20 orang |
| 42 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Palaan Kec. Ngajum | Pelatihan Bagi Aparat Desa (Meningkatkan Pengetahuan bagi Aparat Desa). | 20 orang |
| 43 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Palaan Kec. Ngajum | Pelatihan Lembaga Desa (Meningkatkan Pengetahuan Bagi Lembaga Desa). | 25 orang |
| 44 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Palaan Kec. Ngajum | Pelatihan Bumdes (Meningkatkan Pengetahuan Bagi Anggota Bumdes). | 20 orang |
| 45 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Kaumrejo Kec. Ngantang | Peningkatan Sdm Lembaga Desa (perangkat Desa, BPD Dan LPMD) | 1 Paket |
| 46 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Balai Desa Mulyorejo Kec.ngantang | Pelatihan LPMD Desa Mulyorejo | 12 Peserta |
| 47 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Ngantru Kec. Ngantang | Pelatihan BPD (Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa). | 10 orang |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| 48 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Pandanrejo Kec. Pagak | Pelatihan dan Pemberdayaan Perangkat Desa dan Lembaga Desa | 50 Orang |
| 49 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Sempol Dusun Kranjan Kec. Pagak | Pelatihan dan Pengolahan Managemen Bumdes | 20 orang |
| 50 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Sempol Kec. Pagak | Pelatihan dan Pembinaan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Desa | 20 Orang |
| 51 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Sumberkerto Kec. Pagak | Penyuluhan Dan Penguatan Aparatur dan Lembaga Desa | 1 Kegiatan |
| 52 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Tlogorejo Kec. Pagak | Pendidikan an Pelatihan Pengurus Bumdes (Peningkatan Pemahaman Tentang Pengelolaan Bumdes). | 1 Hari |
| 53 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Karangsono Kec. Pagelaran | Peningkatan Kapasitas Sdm Bumdes, Lpmd, PKK dan Kader Posyandu | 150 Peserta (2 Hari) |
| 54 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Pagelaran Kec. Pagelaran | Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD. | 1 Paket |
| 55 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Pagelaran Kec. Pagelaran | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 Paket |
| 56 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Suwaru Kec. Pagelaran | Pelatihan Peningkatan Kopetensi Perangkat Desa, BPD, LPMD dan Karang Taruna | 50 Orang |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|---|------------------------------|--|--|
| 57 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Bunutwetan Kec. Pakis | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 1 orang |
| 58 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Bunutwetan Kec. Pakis | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 15 orang |
| 59 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Bunutwetan Kec. Pakis | Peningkatan Kapasitas BPD | 7 orang |
| 60 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Bunutwetan Kec. Pakis | Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Meningkatkan Kemampuan Dalam Manajemen Bum Desa). | 15 orang |
| 61 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Pakisjajar Kec. Pakis | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 80 Org |
| 62 | Program Pengembangan Potensi Desa | Pengembangan Sumber Daya Desa | Desa Pucangsongo Kec. Pakis | Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes | 30 Orang |
| 63 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Sukoanyar Kec. Pakis | Pelatihan Pengelolaan Administrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa. | 1 Paket |
| 64 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Genengan Kec. Pakisaji | Peningkatan Kemampuan Sdm Lembaga (Meningkatkan Kemampuan Sdm Aparatur Desa). | 100 Orang |
| 65 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Permanu Kec. Pakisaji | Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa | 4 Paket |
| 66 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Belung Kec. Poncokusumo | Diklat Penyusunan Peraturan Desa (bumdes,) | 1 Paket (perngkat Desa, Bpd, Lpmd, Masyarakat) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|---|---|--|------------|
| 67 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Usaha Sektor Informal | Desa Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan | Pelatihan Membuat dan Bantuan Alat Kelompok Dasawisma | 200 Orang |
| 68 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Ringinsari Kec. Sumbermanjing Wetan | Pelatihan Bumdes | 20 Peserta |
| 69 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Senggreng Kec. Sumberpucung | Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 1 Paket |
| 70 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Senggreng Kec. Sumberpucung | Sosialisasi Dan Pelatihan Bpd Dan Lembaga Desa | 3 Paket |
| 71 | Program Pengembangan Potensi Desa | Pengembangan Sumber Daya Desa | Desa Ternyang Kec. Sumberpucung | Pelatihan dan Pendampingan Pemetaan Potensi Desa (Terselesaikannya Peta Potensi Desa). | 1 Paket |
| 72 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Jambearjo Kec. Tajinan | Pelatihan Bumdes (Pembuatan Desa Mart). | 1 Unit |
| 73 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Jatisari Kec. Tajinan | Pelatihan Bumdes dan Pengembangan Bumdes (Pembangunan Kantor Bumdes). | 1 (Satu) |
| 74 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Kepatihan Kec. Tirtoyudo | Pemberdayaan Ibu-ibu Kader Pkk dan Warga Untuk Keterampilan Berwirausaha | 75 Orang |
| 75 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Wonoagung Kec. Tirtoyudo | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa (Meningkatkan Fungsi Lembaga Desa). | 40 orang |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|---|--------------------------|--|-----------|
| 76 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Slamet Kec. Tumpang | Pelatihan Pengembangan Unit Usaha Bumdes | 1 Paket |
| 77 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Bambang Kec. Wajak | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes | 1 Paket |
| 78 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penataan Pemerintahan Desa | Desa Bringin Kec. Wajak | Pelatihan Pemerintahan Desa Dan Ketua Rt Dan Rw | 100 Orang |
| 79 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Dadapan Kec. Wajak | Pelatihan/ Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes. | 2 Paket |
| 80 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Wonoayu Kec. Wajak | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes | 20 Orang |

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional Tahun 2021, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata;

9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);
10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;

12. Perbaiki kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 pada Misi ke 5, melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan desa, dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel, maka tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan

Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.

Indikator tujuan :

Jumlah desa maju Kabupaten Malang.

b. Sasaran

Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.

Indikator Sasaran :

Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 9 program dan 33 kegiatan, termasuk kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
8. Program Pengembangan Potensi Desa;
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah ;
11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
12. Pengadaan peralatan gedung kantor;
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16. Pengadaan pakaian kerja lapangan
17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ;
18. Pendidikan dan pelatihan formal;
19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
20. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
22. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
23. Pembinaan Lembaga Adat;
24. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat;
25. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat

26. Pengembangan Usaha Sektor Informal
27. Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran;
28. Pengembangan Sumber Daya Desa;
29. Pengembangan Kawasan Perdesaan;
30. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
31. Penatausahaan Keuangan Desa;
32. Penataan Pemerintahan Desa;
33. Penatausahaan Aset Desa.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang untuk program rutin masih mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan untuk program kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tabel di bawah ini. (sesuaikan RPJMD yang baru)

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Keterangan |
|--------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.207.21.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | DPMD | 100% | 1.468.782.000,00 | | - | 100% | 1.470.250.000,00 | |
| 2.207.21.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | DPMD | 2400 buah | 13.891.000,00 | APBD Kabupaten | - | 2400 buah | 13.905.000,00 | |
| 2.207.21.01.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | DPMD | 363 ob | 607.916.000,00 | APBD Kabupaten | - | 363 ob | 608.524.000,00 | |
| 2.207.21.01.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | DPMD | 12 ob | 25.004.000,00 | APBD Kabupaten | | 12 ob | 25.029.000,00 | |
| 2.207.21.01.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | DPMD | 1950 jenis | 69.457.000,00 | APBD Kabupaten | - | 1950 jenis | 69.526.000,00 | |
| 2.207.21.01.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | DPMD | 32720 jenis | 23.323.000,00 | APBD Kabupaten | - | 32720 jenis | 23.346.000,00 | |
| 2.207.21.01.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | DPMD | 60 jenis | 2.940.000,00 | APBD Kabupaten | - | 60 jenis | 2.943.000,00 | |
| 2.207.21.01.07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | DPMD | 1584 jenis | 6.251.000,00 | APBD Kabupaten | - | 1584 jenis | 6.257.000,00 | |
| 2.207.21.01.08 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | DPMD | 13500 hok | 210.000.000,00 | APBD Kabupaten | - | 13500 hok | 210.210.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|---|---|------|-------------|-----------------------|----------------|---|-------------|-----------------------|----|
| 2.207.21.01.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | DPMD | 165 hok | 270.000.000,00 | APBD Kabupaten | - | 470 hok | 270.270.000,00 | |
| 2.207.21.01.10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | DPMD | 575 hok | 240.000.000,00 | APBD Kabupaten | - | 675 hok | 240.240.000,00 | |
| 2.207.21.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 168.893.000,00 | | | 100% | 199.092.000,00 | |
| 2.207.21.02.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | DPMD | 1 unit | 28.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 1 unit | 28.028.000,00 | |
| 2.207.21.02.02 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | DPMD | 10 jenis | 41.650.000,00 | APBD Kabupaten | | 18 jenis | 71.722.000,00 | |
| 2.207.21.02.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | DPMD | 19 unit | 49.175.000,00 | APBD Kabupaten | | 19 unit | 49.224.000,00 | |
| 2.207.21.02.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | DPMD | 30 jenis | 22.068.000,00 | APBD Kabupaten | | 30 jenis | 22.090.000,00 | |
| 2.207.21.02.05 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | DPMD | 1 jenis | 28.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 1 jenis | 28.028.000,00 | |
| 2.207.21.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 58.355.000,00 | | | 100% | 58.413.000,00 | |
| 2.207.21.03.01 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | DPMD | 53 Stel | 30.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 53 Stel | 30.030.000,00 | |
| 2.207.21.03.02 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel) | DPMD | 53 stel | 28.355.000,00 | APBD Kabupaten | | 53 stel | 28.383.000,00 | |
| 2.207.21.04 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | | 100% | 2.894.000,00 | | | 100% | 2.897.000,00 | |
| 2.207.21.04.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | DPMD | 25 orang | 2.894.000,00 | APBD Kabupaten | | 25 orang | 2.897.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|---|---|---------|-------------|-----------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------|----|
| 2.207.21.05 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | | 100% | 125.573.000,00 | | | 100% | 125.698.000,00 | |
| 2.207.21.05.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | DPMD | 12 Buku | 112.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 12 Buku | 112.112.000,00 | |
| 2.207.21.05.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | DPMD | 1 buku | 5.191.000,00 | APBD Kabupaten | | 1 buku | 5.196.000,00 | |
| 2.207.21.05.03 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | DPMD | 1 buku | 8.382.000,00 | APBD Kabupaten | | 1 buku | 8.390.000,00 | |
| 2.207.21.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | | 100% | 585.000.000,00 | | | 100% | 665.615.000,00 | |
| 2.207.21.06.01 | Pengembangan Lembaga Adat | Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa | 33 Kec. | 10 Kec | 150.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 15 Kec. | 200.200.000,00 | |
| 2.207.21.06.02 | Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat | Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun. | 33 kec | 33 Kec. | 225.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 33 Kec. | 225.225.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|---|--|---------------|---------------|-----------------------|----------------|---|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 2.207.21.06.03 | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K | 130 desa | 26 Kec. | 160.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 26 desa | 190.190.000,00 | Mengakomodir kegiatan PUG. |
| | | Jumlah Pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten | 33 Kec | 35 Kali | 50.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 35 Kali | 50.000.000,00 | |
| 2.207.21.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat | | 100% | 525.406.000,00 | | | 100% | 555.962.000,00 | |
| 2.207.21.07.01 | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah BUMDesa yang dibentuk. | 378 desa | 18 desa | 271.525.000,00 | APBD Kabupaten | | 18 desa | 231.757.000,00 | |
| 2.207.21.07.02 | Pengembangan Usaha Sektor Informal | Jumlah pelatihan usaha sektor informal | 16 Desa | 4 desa | 110.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 4 desa | 140.140.000,00 | Mengakomodir kegiatan PUG. |
| 2.207.21.07.03 | Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran | Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS | 33 Kec. | 20 Kec. | 96.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 33 Kec. | 126.126.000,00 | |
| | | Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu | 78 desa | 10 desa | 47.881.000,00 | APBD Kabupaten | | 16 desa | 57.939.000,00 | |
| 2.207.21.08 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA | Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati. | | 100% | 920.396.000,00 | | | 100% | 931.327.000,00 | |
| 2.207.21.08.01 | Penataan Pemerintahan Desa | Jumlah desa Pelatihan aparaturn Pemerintahan Desa | 378 desa | 378 Desa | 251.530.000,00 | APBD Kabupaten | | 378 Desa | 231.762.000,00 | Mengakomodir kegiatan PUG. |
| | | Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten | 15 desa | 3 Desa | 160.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 3 Desa | 180.180.000,00 | |
| | | Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid | 390 desa/kel. | 390 Desa/Kel. | 88.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 390 Desa/Kel. | 88.088.000,00 | |
| | | Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa. | 378 desa | 12 Desa | 41.866.000,00 | APBD Kabupaten | | 12 Desa | 51.918.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|---|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------|---|-------------|-------------------------|----------------------------|
| 2.207.21.08.02 | Penatausahaan Keuangan Desa | Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa | 378 desa | 378 Desa | 285.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 378 Desa | 285.285.000,00 | |
| 2.207.21.08.03 | Penatausahaan Aset Desa | Jumlah aset desa yang didata | 378 desa | 378 desa | 94.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 378 desa | 94.094.000,00 | |
| 2.207.21.09 | PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA | Persentase peningkatan pengembangan potensi desa. | | 100% | 635.000.000,00 | | | 100% | 685.000.000,00 | |
| 2.207.21.09.01 | Pengembangan Kawasan Perdesaan | Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan | 40 Desa | 8 desa | 164.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 8 desa | 184.184.000,00 | |
| 2.207.21.09.02 | Pengembangan Sumber Daya Desa | Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa | 24 Desa | 4 desa | 157.000.000 | APBD Kabupaten | | 4 desa | 172.172.000,00 | Mengakomodir kegiatan PUG. |
| | | Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang. | 378 desa | 140 desa | 100.000.000 | APBD Kabupaten | | 140 desa | 95.095.000,00 | |
| 2.207.21.09.03 | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional | Kab. Malang | 1 unit | 94.000.000 | APBD Kabupaten | | 1 unit | 114.114.000,00 | |
| | | Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG | 378 Desa | 12 desa | 120.000.000 | APBD Kabupaten | | 12 desa | 120.120.000,00 | |
| Jumlah | | | | | 4.490.299.000 | | | | 4.694.939.000,00 | |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, baik yang bersifat teknokratis, top down, buttom up maupun politis. Rencana kerja yang bersifat teknokratis berasal dari rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan target-target kinerja yang akan dicapai selama periode Renstra. Rencana kerja yang bersifat top down, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir program-program dari Instansi Vertikal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rencana kerja yang bersifat buttom up, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan dari pemerintah desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang dimasukkan pada aplikasi e Musrenbang. Sedangkan Rencana kerja yang bersifat politis merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malang.

Pendanaan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Keterangan |
|--------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.207.21.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | 100% | 1.468.782.000,00 | | |
| 2.207.21.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | DPMD | 2400 buah | 13.891.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.01.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | DPMD | 363 ob | 607.916.00,000 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.01.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | DPMD | 12 ob | 25.004.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.01.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | DPMD | 1950 jenis | 69.457.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.01.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | DPMD | 32720 jenis | 23.323.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.01.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | DPMD | 60 jenis | 2.940.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.01.07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | DPMD | 1584 jenis | 6.251.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.01.08 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | DPMD | 13500 hok | 210.000.000,00 | APBD Kabupaten | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------|--|---|------|-------------|-----------------------|----------------|---|
| 2.207.21.01.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | DPMD | 165 hok | 270.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.01.10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | DPMD | 575 hok | 240.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 168.893.000,00 | | |
| 2.207.21.02.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | DPMD | 1 unit | 28.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.02.02 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | DPMD | 10 jenis | 41.650.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.02.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | DPMD | 19 unit | 49.175.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.02.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | DPMD | 30 jenis | 22.068.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.02.05 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | DPMD | 1 jenis | 28.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 58.355.000,00 | | |
| 2.207.21.03.01 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | DPMD | 53 Stel | 30.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.03.02 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel) | DPMD | 53 stel | 28.355.000,00 | APBD Kabupaten | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------|---|---|----------|-------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| 2.207.21.04 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | | 100% | 2.894.000,00 | | |
| 2.207.21.04.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | DPMD | 25 orang | 2.894.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.05 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | | 100% | 125.573.000,00 | | |
| 2.207.21.05.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | DPMD | 12 Buku | 112.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.05.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | DPMD | 1 buku | 5.191.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.05.03 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku) | DPMD | 1 buku | 8.382.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.06 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | | 100% | 585.000.000,00 | | |
| 2.207.21.06.01 | Pengembangan Lembaga Adat | Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa | 33 Kec. | 10 Kec. | 150.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.06.02 | Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat | Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat. | 33 Kec. | 33 Kec. | 225.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.06.02 | Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K | 378 desa | 26 desa | 160.000.000,00 | APBD Kabupaten | Mengakomodir kegiatan PUG. |
| | | Jumlah Pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten | 33 Kec | 35 Kali | 50.000.000,00 | APBD Kabupaten | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------|---|--|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| 2.207.21.07 | Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat | | 100% | 525.406.000,00 | | |
| 2.207.21.07.01 | Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah BUMDesa yang dibentuk. | 378 desa | 18 desa | 271.525.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.07.01 | Pengembangan Usaha Sektor Informal | Jumlah pelatihan usaha sektor informal | 16 Desa | 4 desa | 110.000.000,00 | APBD Kabupaten | Mengakomodir kegiatan PUG. |
| 2.207.21.07.01 | Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran | Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS | 33 Kec. | 33 Kec. | 96.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu | 78 desa | 16 desa | 47.881.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.08 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati. | | 100% | 920.396.000,00 | | |
| 2.207.21.08.01 | Penataan Pemerintahan Desa | Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa | 378 desa | 378 Desa | 251.530.000,00 | APBD Kabupaten | Mengakomodir kegiatan PUG. |
| | | Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten | 15 desa | 3 Desa | 160.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid | 390 desa/kel. | 390 Desa/Kel. | 88.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa. | 378 desa | 12 Desa | 41.866.000,00 | | |
| 2.207.21.08.02 | Penatausahaan Keuangan Desa | Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa | 378 Desa | 378 Desa | 285.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.08.03 | Penatausahaan Aset Desa | Jumlah aset desa yang didata | 378 Desa | 378 Desa | 94.000.000,00 | APBD Kabupaten | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------|---|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------|----------------------------|
| 2.207.21.09 | PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA | Persentase peningkatan pengembangan potensi desa. | | 100% | 635.000.000,00 | | |
| 2.207.21.09.01 | Pengembangan Kawasan Perdesaan | Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan | 40 Desa | 8 desa | 164.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.09.02 | Pengembangan Sumber Daya Desa | Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa | 24 Desa | 4 desa | 157.000.000,00 | APBD Kabupaten | Mengakomodir kegiatan PUG. |
| | | Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang. | 378 desa | 140 desa | 100.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.207.21.09.03 | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional | Kab. Malang | 1 unit | 94.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG | 12 desa | 12 desa | 120.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| Jumlah | | | | | 4.490.299.000,00 | | |

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Tahun 2021 terdapat program/kegiatan sebanyak 9 (sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan.

Rencana tindaklanjut jika dalam proses pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka akan dilaksanakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan mekanisme mengusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN :**1. Penjelasan Pohon Kinerja Tujuan/Sasaran/Program beserta Rumusan Formula**

| Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja | Formula |
|---|--|--|
| Tujuan 5 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel. | | |
| Sasaran 5.1: Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang | Jumlah desa berkembang Kabupaten Malang | Jumlah desa berkembang tahun (n) yang menjadi desa maju. |
| Program 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati | $\left[\frac{\sum \text{Desa yang menyampaikan laporan keuangan desa (ADD) tepat waktu}}{\sum \text{Desa yang seharusnya menyampaikan laporan}} \times 100\% \right]$ |
| Program 2 : Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat | $\left[\frac{\sum \text{BUMDes yang dibentuk}}{\sum \text{Desa yang ditargetkan}} \times 100\% \right]$ |
| Program 3 : Program Pengembangan Potensi Desa | Persentase peningkatan pengembangan potensi desa. | $\left[\frac{\sum \text{Desa yang memanfaatkan potensi desa (Teknologi Tepat Guna dan SDD)}}{\sum \text{Desa yang ditargetkan}} \times 100\% \right]$ |
| Program 4 : Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | $\left[\frac{\sum \text{LPMD/K yang dibina}}{\sum \text{LPMD/K yang ditargetkan}} \times 100\% \right]$ |

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (sesuai E-Renstra Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)

| Indikator Kinerja Utama | | Formula | t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |
|-------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju | Jumlah desa berkembang tahun (n) yang menjadi desa maju | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |